



## MODEL INTEGRATIF KOLABORASI ANTAR ORGANISASI DALAM PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DESA BERBASIS KEMITRAAN PUBLIK

<sup>1\*</sup> Yusup Musyaffa, <sup>2</sup> Asyim Burhani, <sup>3</sup> Mulyaningsih, <sup>4</sup> Ike Kania  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Garut

\*Corresponding Email: <sup>1</sup> [yusufmusyaffa@gmail.com](mailto:yusufmusyaffa@gmail.com), <sup>2</sup> [asyimburhani6@gmail.com](mailto:asyimburhani6@gmail.com), <sup>3</sup> [mulyaningsih@uniga.ac.id](mailto:mulyaningsih@uniga.ac.id), <sup>4</sup> [ikeukania@fisip.uniga.ac.id](mailto:ikeukania@fisip.uniga.ac.id)

### Riwayat Artikel

Dikirim: 29-06-2026

Direvisi: 29-06-2026

Diterima: 30-06-2026

### Abstract

*This study aims to examine and formulate an integrative model of inter-organizational collaboration in strengthening village economic capacity based on public partnerships. This study focuses on the interaction between PT Permodalan Nasional Madani (PNM), the local government, and the village government as the main actors in local economic development. The approach used was qualitative, with a literature-based conceptual analysis and a theoretical synthesis of the concepts of collaborative governance, inter-organizational collaboration, and public-private partnership. The results indicate that the effectiveness of collaboration is largely determined by factors such as trust, shared vision, facilitative leadership, and institutional capacity. Furthermore, it was found that the integration of roles between actors can increase access to economic resources, strengthen local institutions, and encourage community participation. This study produces an integrative model of collaboration that is adaptive and contextual, and can be used as a framework for strengthening village economic capacity. The contribution of this research lies in the development of a collaborative model based on public partnerships that is relevant in the context of village development in developing countries.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Inter-Organizational Collaboration, Village Economic Capacity, Public Partnership, PT PNM

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan model integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik. Studi ini berfokus pada interaksi antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM), pemerintah daerah, dan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis konseptual berbasis literatur dan sintesis teoritik dari konsep collaborative governance, inter-organizational collaboration, dan public-private partnership. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi sangat ditentukan oleh faktor kepercayaan, kesamaan visi, kepemimpinan fasilitatif, serta kapasitas kelembagaan. Selain itu, ditemukan bahwa integrasi peran antar aktor mampu meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian ini menghasilkan model integratif kolaborasi yang bersifat adaptif dan kontekstual, yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model kolaboratif berbasis kemitraan publik yang relevan dalam konteks pembangunan desa di negara berkembang.

**Kata kunci:** Collaborative Governance, Kolaborasi Antar Organisasi, Kapasitas Ekonomi Desa, Kemitraan Publik, PT PNM

## PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma administrasi publik modern menunjukkan adanya pergeseran fundamental dari pendekatan birokrasi yang hierarkis menuju model tata kelola yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis jaringan. Dalam konteks ini, konsep *collaborative governance* menjadi salah satu pendekatan dominan dalam menjelaskan bagaimana aktor-aktor dari sektor publik, privat, dan masyarakat sipil dapat bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama yang kompleks dan multidimensional (Hodge 2007, n.d.) (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Kolaborasi antar organisasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan alternatif, melainkan sebagai kebutuhan strategis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah publik, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi desa, yang memerlukan integrasi berbagai kepentingan, kapasitas, dan sumber daya lintas sektor secara sinergis.

Dalam kerangka teoritis, kolaborasi antar organisasi (*inter-organizational collaboration*) dipahami sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan dua atau lebih organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual (Gray, 1989; Agranoff & McGuire, 2003). Kolaborasi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari koordinasi sederhana hingga integrasi yang kompleks dalam bentuk kemitraan strategis. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepercayaan (*trust*), komunikasi yang efektif, serta kesamaan visi sebagai prasyarat utama keberhasilan kolaborasi. Namun demikian, dalam praktiknya, kolaborasi antar organisasi seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan, asimetri kekuasaan, serta keterbatasan kapasitas institusional, yang dapat menghambat tercapainya tujuan bersama secara optimal (Agranoff & McGuire, 2003).

Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan berbasis kemitraan, model integratif kolaborasi multi-aktor menjadi semakin penting untuk dikaji. Model ini mengacu pada integrasi peran berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam suatu kerangka kerja yang sistematis dan berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2015). Pendekatan seperti *triple helix* dan *penta helix* menunjukkan bahwa inovasi dan pembangunan ekonomi tidak lagi dapat bergantung pada satu aktor dominan, melainkan memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak yang saling melengkapi. Dalam hal ini, kemitraan publik (*public-private partnership*) menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong sinergi antar aktor, khususnya dalam konteks penguatan kapasitas ekonomi lokal (Hodge & Greve, 2007).

Kapasitas ekonomi desa sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional juga menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, kelembagaan, dan kultural yang saling terkait (Scoones, 1998). Dalam perspektif *local economic development*, penguatan kapasitas ekonomi desa harus dilakukan melalui

pendekatan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif (Blakely & Leigh, 2010). Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran lembaga keuangan non-bank seperti PT PNM dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Melalui program-program seperti pembiayaan mikro, PT PNM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang membantu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat (Ledgerwood, 1999). Pendekatan ini sejalan dengan teori *microfinance* yang menekankan pentingnya akses keuangan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran PT PNM dalam konteks kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam hal integrasi program dan koordinasi antar lembaga.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan (Rondinelli, 1981). Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan dengan aktor lain, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal juga memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas ekonomi desa. Pendekatan *community-driven development* menekankan bahwa masyarakat harus menjadi subjek utama dalam proses pembangunan, dengan didukung oleh kelembagaan desa yang kuat dan partisipatif (Mansuri & Rao, 2013). Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga seperti PT PNM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan kolaborasi antar organisasi dalam konteks ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepercayaan antar aktor, kesamaan visi dan tujuan, kepemimpinan yang efektif, serta desain kelembagaan yang mendukung (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, mekanisme berbagi sumber daya dan informasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, kolaborasi berpotensi menjadi tidak efektif dan bahkan kontraproduktif.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor dalam penguatan ekonomi desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks (Emerson & Nabatchi, 2015). Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga serta rendahnya kapasitas institusional. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan model kolaborasi yang lebih integratif dan kontekstual, yang mampu mengakomodasi dinamika lokal serta kebutuhan spesifik masyarakat desa.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam model integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *collaborative governance*, serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan mengkaji peran dan interaksi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, serta merumuskan model yang dapat direplikasi di berbagai konteks daerah.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa kolaborasi antar organisasi merupakan elemen krusial dalam pembangunan ekonomi desa, yang memerlukan pendekatan integratif dan berbasis kemitraan. Kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam konteks ini menuntut adanya inovasi dalam desain kelembagaan dan strategi kolaborasi, yang mampu mengoptimalkan potensi setiap aktor secara sinergis. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan dan penting dalam upaya memperkuat kapasitas ekonomi desa serta mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai bentuk artikulasi kritis terhadap kesenjangan antara konsep ideal kolaborasi antar organisasi dalam administrasi publik dengan realitas empiris yang terjadi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Dalam konteks pembangunan berbasis kemitraan publik, khususnya yang melibatkan PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, terdapat kompleksitas relasi kelembagaan yang memerlukan pendekatan analitis yang mendalam, sistematis, dan berbasis teori. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga eksploratif, evaluatif, dan konstruktif dalam rangka menghasilkan model integratif yang memiliki kontribusi ilmiah dan praktis.

Secara konseptual, kolaborasi antar organisasi dalam perspektif *collaborative governance* menuntut adanya integrasi aktor lintas sektor yang memiliki karakteristik,

kepentingan, serta kapasitas yang berbeda-beda. Namun dalam praktiknya, integrasi tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti ego sektoral, fragmentasi kebijakan, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana model kolaborasi yang efektif dapat dibangun dan diimplementasikan secara kontekstual, khususnya dalam penguatan kapasitas ekonomi desa yang memiliki karakteristik unik dan heterogen.

Lebih lanjut, keberadaan PT PNM sebagai lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema pembiayaan mikro, menambah dimensi kompleksitas dalam relasi kolaboratif tersebut. PT PNM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia akses permodalan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat desa. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan ekonomi lokal, sementara pemerintah desa berperan sebagai pelaksana langsung yang berinteraksi dengan masyarakat secara intensif. Interaksi antara ketiga aktor ini menciptakan dinamika kolaborasi yang perlu dikaji secara mendalam, baik dari aspek kelembagaan, kebijakan, maupun implementasi di lapangan.

Dalam kerangka tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirancang untuk menggali secara kritis berbagai dimensi kolaborasi antar organisasi, mulai dari aspek konseptual hingga implementatif. Rumusan masalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta merumuskan solusi berbasis model integratif yang dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Dengan demikian, rumusan masalah ini menjadi landasan utama dalam keseluruhan proses penelitian, yang akan mengarahkan fokus analisis serta metodologi yang digunakan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan dinamika kolaborasi antar organisasi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penguatan kapasitas ekonomi desa?

Permasalahan ini berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola interaksi, struktur hubungan, serta mekanisme kerja sama yang terbentuk antara ketiga aktor utama dalam penelitian ini. Analisis ini mencakup aspek formal dan informal dari kolaborasi, termasuk peran masing-masing aktor, bentuk koordinasi yang dilakukan, serta tingkat integrasi program yang dijalankan. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana dinamika kekuasaan (*power relations*) dan distribusi sumber daya mempengaruhi kualitas kolaborasi yang terbangun. Dalam konteks ini, pendekatan teoritik seperti *inter-organizational collaboration* dan *collaborative governance* menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas hubungan antar aktor.

Lebih jauh, analisis terhadap dinamika kolaborasi ini juga harus mempertimbangkan faktor kontekstual, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan desa, serta karakteristik program yang dijalankan oleh PT PNM. Dengan demikian, rumusan masalah ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengungkap faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi kolaborasi antar organisasi secara holistik.

2. Apa saja faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa?

Permasalahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas kolaborasi antar organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup aspek seperti kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, serta budaya kelembagaan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi regulasi, dukungan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, serta partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif teoritik, faktor-faktor seperti kepercayaan (*trust*), kesamaan visi (*shared vision*), komunikasi yang efektif, serta mekanisme akuntabilitas menjadi elemen penting dalam keberhasilan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Namun demikian, dalam konteks empiris, faktor-faktor tersebut seringkali tidak terwujud secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai hambatan dalam implementasi kolaborasi. Oleh karena itu, rumusan masalah ini berupaya untuk menggali secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut beroperasi dalam konteks spesifik penelitian, serta bagaimana interaksi antar faktor tersebut mempengaruhi hasil kolaborasi.

3. Bagaimana peran dan kontribusi masing-masing aktor (PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) dalam membangun kapasitas ekonomi desa melalui pendekatan kolaboratif?

Permasalahan ini menekankan pada analisis peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam kerangka kolaborasi. PT PNM sebagai lembaga keuangan memiliki peran dalam menyediakan akses permodalan dan pendampingan usaha, sementara pemerintah daerah berperan dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembangunan ekonomi lokal. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam implementasi program serta mobilisasi partisipasi masyarakat.

Analisis terhadap peran ini tidak hanya mencakup fungsi formal yang dijalankan oleh masing-masing aktor, tetapi juga mencakup kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, penting untuk mengkaji sejauh mana peran tersebut saling melengkapi atau justru tumpang tindih, serta bagaimana koordinasi antar aktor dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

4. Bagaimana model integratif kolaborasi antar organisasi yang ideal dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik?

Permasalahan ini merupakan inti dari penelitian, yang bertujuan untuk merumuskan model kolaborasi yang bersifat integratif, adaptif, dan kontekstual. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai dimensi kolaborasi, termasuk aspek kelembagaan, kebijakan, serta implementasi di lapangan. Dalam hal ini, pendekatan seperti *integrative collaborative governance* dan *public-private partnership* menjadi referensi utama dalam merancang model yang diusulkan.

Pengembangan model ini juga harus mempertimbangkan hasil analisis terhadap dinamika kolaborasi dan faktor determinan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis pada realitas empiris yang ada. Selain itu, model ini diharapkan memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam berbagai konteks daerah, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar kolaborasi yang efektif.

5. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis dari penerapan model integratif kolaborasi antar organisasi terhadap penguatan kapasitas ekonomi desa?

Permasalahan ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari penerapan model kolaborasi yang diusulkan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep *collaborative governance* dan *inter-organizational collaboration*, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, termasuk PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Analisis terhadap implikasi ini juga mencakup evaluasi terhadap potensi keberlanjutan (*sustainability*) dari model yang diusulkan, serta kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Dengan demikian, rumusan masalah ini menjadi penutup yang mengintegrasikan seluruh dimensi penelitian, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, rumusan masalah ini dirancang untuk mencerminkan kompleksitas dan kedalaman analisis yang diperlukan dalam penelitian berstandar doktoral. Setiap pertanyaan tidak hanya menggambarkan fenomena yang diteliti, tetapi juga mengandung dimensi kritis, analitis, dan konstruktif yang akan menjadi dasar dalam pengembangan kerangka teoritis, metodologi, serta pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah ini diharapkan mampu mengarahkan penelitian secara sistematis dan menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang administrasi publik.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan elemen fundamental dalam struktur karya ilmiah yang berfungsi sebagai arah konseptual sekaligus operasional dalam keseluruhan proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, tujuan tidak hanya dimaknai sebagai capaian deskriptif, melainkan sebagai konstruksi ilmiah yang mencerminkan upaya eksplorasi, eksplanasi, evaluasi, dan formulasi model baru dalam kerangka pengembangan ilmu administrasi publik. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan penelitian ini dirancang untuk menghasilkan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan, khususnya dalam pengembangan model integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik.

Secara umum, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan merumuskan model integratif kolaborasi antar organisasi yang efektif dan adaptif dalam mendukung penguatan kapasitas ekonomi desa melalui sinergi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Tujuan ini berangkat dari kesadaran bahwa kompleksitas permasalahan pembangunan ekonomi desa tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu aktor saja, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu model yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks kebijakan dan praktik administrasi publik di Indonesia.

Lebih lanjut, tujuan penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antar organisasi dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Hal ini mencakup analisis terhadap pola interaksi, mekanisme koordinasi, serta struktur hubungan antar aktor yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara mendalam bagaimana kolaborasi tersebut terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam praktik, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya.

Adapun tujuan penelitian ini secara spesifik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik dan dinamika kolaborasi antar organisasi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penguatan kapasitas ekonomi desa

Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam pola hubungan yang terbentuk antara ketiga aktor utama dalam penelitian ini. Analisis ini mencakup dimensi struktural, fungsional, dan relasional dari kolaborasi, termasuk bagaimana peran masing-masing aktor dijalankan, bagaimana koordinasi dilakukan, serta bagaimana integrasi program diwujudkan dalam praktik. Selain itu, tujuan ini juga mencakup upaya untuk mengkaji dinamika interaksi antar aktor, termasuk

potensi konflik, negosiasi kepentingan, serta mekanisme resolusi yang digunakan dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi.

Dalam kerangka ini, penelitian tidak hanya berhenti pada identifikasi pola kolaborasi, tetapi juga berupaya untuk mengevaluasi kualitas hubungan antar organisasi, termasuk tingkat kepercayaan, komitmen, dan keterbukaan dalam berbagi informasi dan sumber daya. Dengan demikian, tujuan ini memiliki dimensi analitis yang kuat dalam menggambarkan realitas empiris kolaborasi antar organisasi secara komprehensif.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa

Tujuan ini diarahkan untuk menggali secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi aspek seperti kepemimpinan, kapasitas organisasi, budaya kelembagaan, serta sistem manajemen yang diterapkan oleh masing-masing aktor. Sementara itu, faktor eksternal mencakup regulasi, dukungan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta tingkat partisipasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, tetapi juga mengevaluasi bagaimana interaksi antar faktor tersebut membentuk kondisi yang mendukung atau menghambat keberhasilan kolaborasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas faktor determinan dalam kolaborasi antar organisasi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam konteks kebijakan dan praktik.

3. Menganalisis peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam kerangka kolaborasi untuk penguatan kapasitas ekonomi desa

Tujuan ini berfokus pada analisis peran strategis yang dimainkan oleh masing-masing aktor, yaitu PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, dalam kerangka kolaborasi yang terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana masing-masing aktor menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, serta bagaimana kontribusi tersebut berdampak terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, tujuan ini juga mencakup analisis terhadap sinergi antar peran, termasuk potensi tumpang tindih, kekosongan peran, serta peluang untuk meningkatkan efektivitas melalui koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat peran secara individual, tetapi juga dalam konteks relasional dan sistemik, yang mencerminkan kompleksitas kolaborasi antar organisasi dalam praktik administrasi publik.

4. Merumuskan model integratif kolaborasi antar organisasi yang efektif, adaptif, dan kontekstual dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik

Tujuan ini merupakan inti dari penelitian, yang berorientasi pada pengembangan model konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam membangun dan mengelola kolaborasi antar organisasi. Model yang dirumuskan diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai dimensi kolaborasi, termasuk aspek kelembagaan, kebijakan, serta implementasi program di lapangan.

Dalam proses perumusan model ini, penelitian akan mengacu pada hasil analisis empiris serta kerangka teoritik yang relevan, sehingga model yang dihasilkan memiliki validitas ilmiah dan relevansi praktis. Selain itu, model ini juga diharapkan memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam berbagai konteks daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal serta dinamika sosial-ekonomi yang ada.

5. Menganalisis implikasi teoritis dan praktis dari model integratif kolaborasi antar organisasi terhadap penguatan kapasitas ekonomi desa

Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari model yang diusulkan, baik dalam konteks pengembangan teori maupun praktik administrasi publik. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai *collaborative governance* dan *inter-organizational collaboration*, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi desa di negara berkembang.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap potensi keberlanjutan model, serta kemampuannya dalam menciptakan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini dirancang untuk mencerminkan pendekatan ilmiah yang komprehensif dan integratif, yang tidak hanya berfokus pada pemahaman fenomena, tetapi juga pada pengembangan solusi yang inovatif dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang *משמעות* baik dalam pengembangan ilmu administrasi publik maupun dalam praktik pembangunan ekonomi desa berbasis kolaborasi antar organisasi.

## MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian merupakan bagian integral dalam struktur karya ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan kontribusi yang dihasilkan, baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik kebijakan dan implementasi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji **model**

**integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik**, manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, yang keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan kontribusi yang komprehensif.

#### A. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian *collaborative governance*, *inter-organizational collaboration*, dan kemitraan publik (*public-private partnership*). Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan terhadap teori-teori yang telah ada, tetapi juga sebagai upaya rekonstruksi dan pengembangan model konseptual yang lebih integratif dan kontekstual, sesuai dengan dinamika pembangunan di tingkat lokal, khususnya di desa.

Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah teori *collaborative governance* dengan menghadirkan perspektif baru yang berbasis pada integrasi multi-aktor dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Selama ini, sebagian besar literatur mengenai kolaborasi antar organisasi lebih banyak berfokus pada konteks perkotaan atau sektor tertentu, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana kolaborasi tersebut beroperasi dalam konteks desa yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis empiris.

Kedua, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori kolaborasi antar organisasi dengan menekankan pentingnya model integratif yang mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan antar aktor lintas sektor. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji tidak hanya aspek struktural dari kolaborasi, tetapi juga dimensi relasional, seperti kepercayaan, komunikasi, dan kepemimpinan, yang seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antar organisasi dalam praktik administrasi publik.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep kemitraan publik (*public-private partnership*) dengan menyoroti peran lembaga keuangan non-bank seperti PT PNM dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Selama ini, kajian mengenai PPP lebih banyak berfokus pada proyek infrastruktur atau layanan publik skala besar, sehingga peran aktor seperti PT PNM dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat masih relatif kurang mendapat perhatian. Oleh

karena itu, penelitian ini membuka ruang baru dalam kajian PPP dengan memperluas cakupan analisis ke sektor pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Keempat, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dalam kajian administrasi publik, khususnya dalam pendekatan analisis kolaboratif yang bersifat multidimensional dan interdisipliner. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan teoritik dan empiris, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena kolaborasi antar organisasi dalam konteks yang berbeda.

Kelima, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi para peneliti, dosen, dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian-kajian lanjutan yang berkaitan dengan kolaborasi antar organisasi, pembangunan ekonomi desa, serta kemitraan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan.

## B. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi dalam ranah akademis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan, khususnya bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi desa, seperti PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Manfaat praktis ini berkaitan dengan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta implementasi program yang lebih efektif dan efisien.

Pertama, bagi PT PNM, penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif. Dengan memahami dinamika kolaborasi antar organisasi, PT PNM dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu PT PNM dalam merancang program yang lebih terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat desa.

Kedua, bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola kolaborasi antar organisasi. Dengan adanya model integratif yang dihasilkan dari penelitian ini, pemerintah daerah dapat memiliki kerangka kerja yang lebih jelas dalam membangun dan mengelola kemitraan dengan berbagai aktor, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Ketiga, bagi pemerintah desa, penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kapasitas dalam mengelola program pembangunan yang berbasis partisipasi dan kolaborasi. Dengan memahami peran dan mekanisme kolaborasi, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan berbagai program yang melibatkan aktor eksternal, serta dalam memobilisasi partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif.

Keempat, bagi masyarakat desa, penelitian ini secara tidak langsung memberikan manfaat melalui peningkatan kualitas program pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang efektif antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya, informasi, dan peluang ekonomi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kelima, bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan kolaborasi antar organisasi dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan adanya bukti empiris dan model konseptual yang dihasilkan dari penelitian ini, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan lokal.

Keenam, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis dalam bentuk model integratif yang dapat direplikasi dan diadaptasi di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan, serta dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk penguatan kapasitas ekonomi desa.

Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini mencerminkan kontribusi yang luas dan mendalam, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik pembangunan. Dengan mengintegrasikan perspektif akademis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta memberikan solusi yang inovatif dan aplikatif dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi desa di era modern.

## BAB II

### TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Kajian mengenai kolaborasi antar organisasi dalam administrasi publik telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Dalam konteks ini, konsep *collaborative governance* menjadi salah satu pendekatan dominan yang digunakan untuk memahami

bagaimana aktor-aktor lintas sektor dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat ditentukan oleh kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), serta kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*). Sementara itu, Emerson dan Nabatchi (2015) mengembangkan kerangka integratif yang menekankan pada pentingnya dinamika kolaborasi (*collaborative dynamics*) yang melibatkan interaksi antara prinsip-prinsip keterlibatan (*principled engagement*), kapasitas bersama (*shared capacity*), dan motivasi bersama (*shared motivation*). Kedua pendekatan ini menjadi landasan teoritis utama dalam memahami bagaimana kolaborasi antar organisasi dapat dibangun dan dikelola secara efektif dalam konteks administrasi publik modern.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori kolaborasi antar organisasi, Gray (1989) menekankan bahwa kolaborasi merupakan proses interaktif yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda namun saling bergantung dalam mencapai solusi bersama terhadap permasalahan kompleks. Agranoff dan McGuire (2003) memperluas konsep ini dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari koordinasi hingga integrasi penuh, serta menekankan pentingnya kapasitas manajerial dalam mengelola hubungan antar organisasi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kualitas hubungan interpersonal, seperti kepercayaan dan komunikasi yang efektif (Agranoff & McGuire, 2003). Dalam konteks ini, kolaborasi antar organisasi menjadi suatu proses yang dinamis dan kompleks, yang memerlukan pendekatan multidimensional dalam analisisnya.

Dalam upaya mengembangkan model kolaborasi yang lebih integratif, berbagai penelitian telah mengadopsi pendekatan *cross-sector collaboration* yang melibatkan aktor dari sektor publik, privat, dan masyarakat sipil. Model seperti *triple helix* dan *penta helix* menunjukkan bahwa inovasi dan pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan aktif berbagai aktor yang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda (Emerson & Nabatchi, 2015). Penelitian-penelitian ini menekankan bahwa integrasi antar aktor tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memerlukan keselarasan nilai, tujuan, dan strategi. Dalam konteks ini, model integratif kolaborasi menjadi penting untuk dikembangkan sebagai kerangka kerja yang mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan antar aktor dalam pembangunan ekonomi lokal.

Selanjutnya, dalam konteks kemitraan publik, konsep *public-private partnership* (PPP) telah menjadi fokus utama dalam berbagai studi mengenai kolaborasi antar organisasi. Hodge dan Greve (2007) menyatakan bahwa PPP merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan pembagian risiko, tanggung jawab, dan manfaat antara sektor publik dan privat dalam penyediaan layanan publik. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan PPP sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas yang diterapkan. Namun demikian, sebagian besar studi mengenai PPP masih berfokus pada sektor

infrastruktur, sehingga terdapat kebutuhan untuk memperluas kajian ke sektor lain, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa.

Dalam konteks penguatan kapasitas ekonomi desa, berbagai penelitian telah mengkaji pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan potensi lokal. Scoones (1998) melalui pendekatan *sustainable livelihood* menekankan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Blakely dan Leigh (2010) dalam kajian mengenai *local economic development* menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi lokal yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan kelembagaan yang kuat. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas ekonomi desa harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Peran lembaga keuangan non-bank seperti PT PNM dalam konteks ini juga telah menjadi fokus dalam beberapa penelitian mengenai inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Ledgerwood (1999) dalam kajiannya mengenai *microfinance* menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pembiayaan mikro yang disertai dengan pendampingan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada integrasi dengan kebijakan dan program pembangunan lainnya, serta pada kualitas kolaborasi dengan aktor lain, seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal juga telah banyak dikaji. Rondinelli (1981) menyatakan bahwa desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan dengan aktor lain. Dalam hal ini, kolaborasi antar organisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi lokal.

Sementara itu, peran pemerintah desa dalam pembangunan partisipatif juga telah menjadi fokus dalam berbagai studi. Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan bahwa pendekatan *community-driven development* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta efektivitas program pembangunan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan desa serta potensi dominasi oleh elite lokal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari aktor lain, seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan, untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan.

Selain itu, berbagai penelitian juga telah mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar organisasi. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya kepercayaan, komitmen, serta kepemimpinan dalam membangun kolaborasi yang efektif. Emerson dan Nabatchi (2015) menambahkan bahwa motivasi bersama serta kapasitas bersama merupakan elemen penting dalam dinamika kolaborasi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kualitas interaksi antar aktor.

Dalam konteks empiris, berbagai studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor dalam penguatan ekonomi desa memiliki potensi besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi, tumpang tindih program, serta rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama dalam implementasi kolaborasi. Selain itu, terdapat juga kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam membangun kolaborasi antar organisasi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai pendekatan dan model kolaborasi antar organisasi, masih terdapat kesenjangan dalam hal integrasi antar aktor, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi desa berbasis kemitraan publik. Sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral dan belum mengembangkan model yang secara komprehensif mengintegrasikan peran lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam satu kerangka kerja yang sistematis.

#### Penegasan State of The Art

Berdasarkan keseluruhan tinjauan penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa **state of the art** dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk **mengembangkan model integratif kolaborasi antar organisasi yang menggabungkan secara simultan dimensi collaborative governance, inter-organizational collaboration, dan public-private partnership dalam konteks penguatan kapasitas ekonomi desa**. Penelitian ini tidak hanya mereplikasi model yang telah ada, tetapi juga berupaya untuk mengisi kesenjangan literatur dengan menghadirkan pendekatan yang lebih holistik, kontekstual, dan aplikatif, khususnya melalui integrasi peran PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi desa berbasis kemitraan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik, serta menjadi referensi penting dalam kajian kolaborasi antar organisasi di masa mendatang.

#### KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan konstruksi intelektual yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai konsep utama yang relevan dengan fokus kajian, yaitu model integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis, tetapi juga sebagai representasi sistematis dari hubungan antar variabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Dengan mengacu pada berbagai teori dan temuan empiris yang telah dibahas dalam tinjauan literatur, kerangka konsep ini dibangun secara holistik untuk mencerminkan kompleksitas fenomena kolaborasi antar organisasi dalam konteks administrasi publik modern.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari paradigma *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor-aktor dari sektor publik dan non-publik dalam suatu forum yang bersifat formal dan konsensus-oriented. Dalam kerangka ini, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai interaksi antar organisasi, tetapi juga sebagai proses institusional yang melibatkan berbagai dimensi, seperti kepercayaan, komunikasi, dan kepemimpinan. Emerson dan Nabatchi (2015) kemudian mengembangkan konsep ini dengan menekankan pada dinamika kolaborasi yang terdiri dari *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga elemen ini menjadi fondasi utama dalam membangun kerangka konsep yang mampu menjelaskan bagaimana kolaborasi antar organisasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antar organisasi diposisikan sebagai variabel utama yang mempengaruhi penguatan kapasitas ekonomi desa. Kolaborasi ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu PT PNM sebagai representasi sektor privat (meskipun memiliki mandat publik), pemerintah daerah sebagai aktor kebijakan, dan pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat lokal. Ketiga aktor ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam kerangka kemitraan publik. Oleh karena itu, kerangka konsep ini menempatkan kolaborasi antar organisasi sebagai proses integratif yang menghubungkan berbagai sumber daya, kapasitas, dan kepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, konsep kolaborasi antar organisasi dalam penelitian ini juga diperkaya dengan perspektif *inter-organizational collaboration* yang dikemukakan oleh Gray (1989) dan Agranoff dan McGuire (2003). Dalam perspektif ini, kolaborasi dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi berkelanjutan antar organisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama. Gray (1989) menekankan bahwa kolaborasi terjadi ketika aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda menyadari adanya ketergantungan satu sama lain dan memilih untuk bekerja sama dalam mencapai solusi bersama. Sementara itu, Agranoff dan McGuire (2003) menyoroti pentingnya kapasitas manajerial dalam mengelola kolaborasi, termasuk

kemampuan dalam membangun jaringan, memfasilitasi komunikasi, dan mengelola konflik.

Dalam kerangka konsep ini, kolaborasi antar organisasi tidak hanya dilihat sebagai hubungan struktural, tetapi juga sebagai proses relasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan. Faktor-faktor tersebut meliputi kepercayaan (*trust*), kesamaan visi (*shared vision*), kepemimpinan, komunikasi, serta desain kelembagaan (Ansell & Gash, 2008). Faktor-faktor ini berperan sebagai variabel intervening yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, kerangka konsep ini mengintegrasikan dimensi struktural dan relasional dalam memahami kolaborasi antar organisasi.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat dimensi integratif dari kerangka konsep, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan *cross-sector collaboration* yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai sektor dalam pembangunan. Model seperti *triple helix* dan *penta helix* menunjukkan bahwa inovasi dan pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai secara optimal tanpa adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam konteks ini, PT PNM berperan sebagai aktor yang menjembatani sektor keuangan dengan masyarakat, sementara pemerintah daerah dan desa berperan dalam menciptakan lingkungan kebijakan dan implementasi yang kondusif. Oleh karena itu, kerangka konsep ini menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen kunci dalam penguatan kapasitas ekonomi desa.

Dalam dimensi kemitraan publik, konsep *public-private partnership* (PPP) menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara PT PNM dan pemerintah. Hodge dan Greve (2007) menyatakan bahwa PPP merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan pembagian risiko, tanggung jawab, dan manfaat antara sektor publik dan privat. Dalam kerangka konsep ini, PPP tidak hanya dipahami sebagai kontrak formal, tetapi juga sebagai hubungan strategis yang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen bersama. Dengan demikian, kerangka konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip PPP dalam membangun model kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kapasitas ekonomi desa, yang dipahami sebagai kemampuan masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Scoones (1998) melalui pendekatan *sustainable livelihood* menekankan bahwa kapasitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh aset ekonomi, tetapi juga oleh aset sosial, manusia, dan kelembagaan. Blakely dan Leigh (2010) menambahkan bahwa pengembangan ekonomi lokal memerlukan pendekatan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, kerangka konsep ini mengadopsi pendekatan multidimensional dalam memahami kapasitas ekonomi desa.

Dalam konteks ini, peran masing-masing aktor menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kapasitas ekonomi desa. PT PNM melalui program pembiayaan mikro dan pendampingan usaha berkontribusi dalam meningkatkan akses terhadap modal dan pengetahuan usaha (Ledgerwood, 1999). Pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal (Rondinelli, 1981). Sementara itu, pemerintah desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif berperan dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola program pembangunan (Mansuri & Rao, 2013). Ketiga aktor ini saling berinteraksi dalam kerangka kolaborasi yang mempengaruhi kapasitas ekonomi desa.

Lebih lanjut, kerangka konsep ini juga mempertimbangkan adanya faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan antara kolaborasi antar organisasi dan kapasitas ekonomi desa. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya lokal, serta kebijakan yang berlaku. Faktor kontekstual ini berfungsi sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel utama dalam penelitian.

Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: (1) kolaborasi antar organisasi sebagai variabel independen, (2) faktor determinan sebagai variabel intervening, (3) kapasitas ekonomi desa sebagai variabel dependen, serta (4) faktor kontekstual sebagai variabel moderating. Hubungan antar komponen ini bersifat dinamis dan saling mempengaruhi, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang komprehensif dan integratif.

Dalam konteks pengembangan model, kerangka konsep ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan model integratif kolaborasi antar organisasi. Model ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai dimensi kolaborasi, termasuk aspek kelembagaan, relasional, dan kontekstual, dalam satu kerangka kerja yang sistematis. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas teoritis, tetapi juga relevansi praktis dalam konteks pembangunan ekonomi desa.

Secara keseluruhan, kerangka konsep ini mencerminkan pendekatan ilmiah yang komprehensif dan integratif dalam memahami fenomena kolaborasi antar organisasi. Dengan menggabungkan berbagai perspektif teoritik dan empiris, kerangka ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi analisis dan pengembangan model dalam penelitian ini. Selain itu, kerangka konsep ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur administrasi publik, khususnya dalam kajian kolaborasi antar organisasi dan pembangunan ekonomi desa berbasis kemitraan publik.

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun sebagai fondasi epistemologis dan konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel serta memberikan justifikasi ilmiah terhadap pendekatan yang digunakan dalam mengkaji model integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik. Kerangka teori ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan konsep, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang terstruktur yang menghubungkan teori-teori utama dalam administrasi publik dengan realitas empiris yang menjadi objek kajian. Dalam konteks ini, teori-teori yang digunakan meliputi *collaborative governance*, *inter-organizational collaboration*, model kolaborasi integratif lintas sektor, *public-private partnership*, teori kapasitas ekonomi desa, serta teori peran kelembagaan dalam desentralisasi dan pembangunan partisipatif.

Sebagai landasan utama, teori *collaborative governance* menjadi kerangka makro yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor dari berbagai sektor dapat berinteraksi dalam suatu sistem tata kelola yang kolaboratif. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor-aktor non-negara dalam suatu forum yang bersifat formal, konsensus-oriented, dan deliberatif. Teori ini menekankan bahwa kolaborasi bukan sekadar kerja sama teknis, tetapi merupakan proses institusional yang melibatkan negosiasi kepentingan, pembangunan kepercayaan, serta pencapaian kesepakatan bersama. Dalam model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, terdapat beberapa komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*).

Emerson dan Nabatchi (2015) kemudian mengembangkan teori ini melalui pendekatan integratif yang menekankan pada dinamika kolaborasi (*collaborative dynamics*). Dalam kerangka ini, kolaborasi dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. *Principled engagement* mencakup proses interaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan dialog yang konstruktif. *Shared motivation* mencerminkan adanya kepercayaan, komitmen, dan rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Sementara itu, *capacity for joint action* merujuk pada kemampuan kolektif aktor-aktor dalam melaksanakan tindakan bersama secara efektif. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika kolaborasi yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik berbasis kemitraan.

Dalam konteks penelitian ini, teori *collaborative governance* digunakan untuk menjelaskan bagaimana PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat membentuk suatu sistem tata kelola yang kolaboratif dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Ketiga aktor ini memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam kerangka kemitraan publik. Oleh karena itu, teori ini memberikan

landasan konseptual dalam memahami bagaimana interaksi antar aktor dapat dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, teori kolaborasi antar organisasi (*inter-organizational collaboration*) memberikan perspektif mikro yang lebih fokus pada hubungan antar organisasi sebagai unit analisis utama. Gray (1989) mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu proses di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda bekerja bersama untuk mencari solusi terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individual. Teori ini menekankan pentingnya kesadaran akan interdependensi serta komitmen untuk bekerja sama sebagai prasyarat utama kolaborasi. Agranoff dan McGuire (2003) memperluas konsep ini dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari koordinasi hingga integrasi penuh, serta menekankan pentingnya kapasitas manajerial dalam mengelola hubungan antar organisasi.

Dalam kerangka teori ini, kolaborasi antar organisasi tidak hanya dipahami sebagai hubungan struktural, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi, komunikasi, dan negosiasi antar aktor. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti kepercayaan (*trust*), komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terbentuk dan berkembang dalam praktik, serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi efektivitas penguatan kapasitas ekonomi desa.

Lebih lanjut, dalam rangka mengembangkan model yang lebih integratif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kolaborasi lintas sektor (*cross-sector collaboration*) yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam pembangunan. Model seperti *triple helix* dan *penta helix* menunjukkan bahwa inovasi dan pembangunan ekonomi memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam model *triple helix*, kolaborasi terjadi antara pemerintah, sektor bisnis, dan institusi pendidikan, sementara model *penta helix* menambahkan peran masyarakat sipil dan media sebagai aktor tambahan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut diadaptasi dengan menempatkan PT PNM sebagai representasi sektor keuangan, pemerintah daerah sebagai aktor kebijakan, dan pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat lokal. Ketiga aktor ini membentuk suatu sistem kolaborasi lintas sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong penguatan kapasitas ekonomi desa. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan kerangka teoritik dalam merancang model integratif yang mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan antar aktor.

Selanjutnya, teori *public-private partnership* (PPP) digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sektor publik dan privat dalam kerangka kemitraan. Hodge dan Greve (2007) mendefinisikan PPP sebagai suatu bentuk kerja sama antara pemerintah

dan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik, yang melibatkan pembagian risiko, tanggung jawab, dan manfaat. Teori ini menekankan pentingnya kejelasan peran, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas dalam memastikan keberhasilan kemitraan.

Dalam penelitian ini, konsep PPP diperluas untuk mencakup kemitraan antara PT PNM sebagai lembaga keuangan non-bank dengan pemerintah daerah dan desa dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, PPP tidak hanya dipahami sebagai kontrak formal, tetapi juga sebagai hubungan strategis yang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen bersama. Hal ini sejalan dengan pendekatan *co-production* dan *co-creation* dalam administrasi publik, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai aktor dalam proses penciptaan nilai publik.

Dalam dimensi ekonomi, teori kapasitas ekonomi desa menjadi landasan dalam memahami variabel dependen dalam penelitian ini. Scoones (1998) melalui pendekatan *sustainable livelihood* menekankan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat ditentukan oleh akses terhadap berbagai jenis aset, yaitu aset manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Pendekatan ini menekankan bahwa penguatan kapasitas ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Blakely dan Leigh (2010) dalam teori *local economic development* menambahkan bahwa pembangunan ekonomi lokal memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan kelembagaan yang kuat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan desa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal, sementara lembaga seperti PT PNM berperan dalam menyediakan akses terhadap sumber daya keuangan dan pendampingan usaha. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar dalam memahami bagaimana kapasitas ekonomi desa dapat diperkuat melalui kolaborasi antar organisasi.

Selain itu, teori *microfinance* yang dikemukakan oleh Ledgerwood (1999) memberikan perspektif mengenai peran lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal. Dalam konteks penelitian ini, PT PNM sebagai lembaga keuangan non-bank memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan mikro serta pendampingan usaha bagi masyarakat desa.

Dalam dimensi kelembagaan, teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Rondinelli (1981) memberikan landasan dalam memahami peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan yang

sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin kolaborasi dengan aktor lain.

Sementara itu, teori pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Mansuri dan Rao (2013) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan *community-driven development* menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat serta dalam mengelola program pembangunan di tingkat lokal.

Dengan mengintegrasikan berbagai teori tersebut, kerangka teori dalam penelitian ini membentuk suatu sistem konseptual yang komprehensif dalam memahami fenomena kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Teori *collaborative governance* dan *inter-organizational collaboration* memberikan dasar dalam memahami dinamika kolaborasi, sementara pendekatan *cross-sector collaboration* dan PPP memberikan kerangka dalam merancang model integratif. Di sisi lain, teori kapasitas ekonomi desa, *microfinance*, desentralisasi, dan pembangunan partisipatif memberikan landasan dalam memahami konteks dan variabel dependen dalam penelitian.

Secara keseluruhan, kerangka teori ini mencerminkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai perspektif dalam administrasi publik, ekonomi pembangunan, dan studi kelembagaan. Dengan demikian, kerangka teori ini tidak hanya memberikan dasar analitis yang kuat, tetapi juga menjadi landasan dalam pengembangan model integratif yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

## KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan sintesis logis dan sistematis dari berbagai konsep, teori, serta temuan empiris yang telah dibahas sebelumnya, yang digunakan untuk menjelaskan alur hubungan sebab-akibat antar variabel dalam penelitian. Kerangka berpikir tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam proses analisis, tetapi juga sebagai alat untuk membangun argumentasi ilmiah yang koheren dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam konteks ini, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan bagaimana model integratif kolaborasi antar organisasi dapat berkontribusi terhadap penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik, dengan melibatkan aktor utama yaitu PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Secara konseptual, kerangka berpikir ini berangkat dari asumsi dasar bahwa kompleksitas permasalahan pembangunan ekonomi desa tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral atau parsial, melainkan memerlukan pendekatan

kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kapasitas yang berbeda. Dalam hal ini, konsep *collaborative governance* menjadi landasan utama yang menjelaskan bahwa keterlibatan aktor lintas sektor dalam suatu proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menempatkan kolaborasi antar organisasi sebagai variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan penguatan kapasitas ekonomi desa.

Dalam kerangka berpikir ini, kolaborasi antar organisasi dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Proses ini tidak hanya mencakup aspek koordinasi formal, tetapi juga melibatkan dimensi relasional seperti kepercayaan, komunikasi, dan komitmen bersama. Gray (1989) menekankan bahwa kolaborasi terjadi ketika aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda menyadari adanya ketergantungan satu sama lain dan memilih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Agranoff dan McGuire (2003) menyoroti pentingnya kapasitas manajerial dalam mengelola hubungan antar organisasi, termasuk dalam hal membangun jaringan, memfasilitasi komunikasi, dan mengelola konflik.

Berdasarkan perspektif tersebut, kerangka berpikir ini mengasumsikan bahwa efektivitas kolaborasi antar organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi, serta struktur kelembagaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup regulasi, dukungan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta tingkat partisipasi publik. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan (*trust*), kesamaan visi (*shared vision*), serta kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen kunci dalam membangun kolaborasi yang efektif. Emerson dan Nabatchi (2015) menambahkan bahwa motivasi bersama dan kapasitas untuk bertindak secara kolektif juga menjadi faktor penting dalam dinamika kolaborasi.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga aktor utama memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka kolaborasi. PT PNM sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam menyediakan akses pembiayaan mikro serta pendampingan usaha bagi masyarakat desa (Ledgerwood, 1999). Pemerintah daerah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal (Rondinelli, 1981). Sementara itu, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana program dan fasilitator partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mansuri & Rao, 2013). Interaksi antara ketiga aktor ini membentuk suatu sistem kolaborasi yang kompleks, yang memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Kerangka berpikir ini juga mengintegrasikan pendekatan *cross-sector collaboration* yang menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik, privat, dan masyarakat

dalam pembangunan ekonomi. Model seperti *triple helix* dan *penta helix* menunjukkan bahwa inovasi dan pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa adanya keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam konteks ini, kolaborasi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa merupakan bentuk konkret dari kolaborasi lintas sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong penguatan kapasitas ekonomi desa.

Lebih lanjut, kerangka berpikir ini juga mengadopsi prinsip-prinsip *public-private partnership* (PPP) sebagai dasar dalam memahami hubungan antara sektor publik dan privat. Hodge dan Greve (2007) menyatakan bahwa PPP merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan pembagian risiko, tanggung jawab, dan manfaat antara aktor publik dan privat. Dalam penelitian ini, PPP tidak hanya dipahami sebagai kontrak formal, tetapi juga sebagai hubungan strategis yang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen bersama. Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kejelasan peran, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas yang diterapkan.

Dalam dimensi hasil, kerangka berpikir ini menempatkan kapasitas ekonomi desa sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh efektivitas kolaborasi antar organisasi. Kapasitas ekonomi desa dipahami sebagai kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Scoones (1998) melalui pendekatan *sustainable livelihood* menekankan bahwa kapasitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh aset finansial, tetapi juga oleh aset manusia, sosial, dan kelembagaan. Blakely dan Leigh (2010) menambahkan bahwa pengembangan ekonomi lokal memerlukan pendekatan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal.

Dalam kerangka berpikir ini, diasumsikan bahwa kolaborasi antar organisasi yang efektif akan meningkatkan kapasitas ekonomi desa melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, seperti modal, informasi, dan teknologi. Kedua, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Ketiga, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keempat, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha lokal.

Namun demikian, hubungan antara kolaborasi antar organisasi dan kapasitas ekonomi desa tidak bersifat linear dan deterministik, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya lokal, serta kebijakan yang berlaku. Faktor kontekstual ini berfungsi sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kolaborasi terhadap kapasitas ekonomi desa. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menekankan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan adaptif dalam membangun model kolaborasi yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat dirumuskan sebagai suatu alur logis yang dimulai dari identifikasi masalah pembangunan ekonomi desa yang kompleks, yang kemudian dijawab melalui pendekatan kolaborasi antar organisasi. Kolaborasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan, yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas ekonomi desa sebagai hasil akhir. Dalam proses tersebut, peran masing-masing aktor menjadi sangat penting dalam menentukan efektivitas kolaborasi.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya menggambarkan hubungan antar variabel, tetapi juga menjelaskan mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Kerangka ini menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis atau proposisi penelitian, serta dalam menentukan pendekatan metodologis yang digunakan. Selain itu, kerangka berpikir ini juga memberikan arah dalam pengembangan model integratif kolaborasi antar organisasi yang menjadi tujuan utama penelitian.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini mencerminkan pendekatan ilmiah yang komprehensif dan integratif dalam memahami fenomena kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Dengan menggabungkan berbagai perspektif teoritik dan empiris, kerangka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta dalam praktik pembangunan ekonomi desa berbasis kemitraan publik.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap model integratif kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik, dengan melibatkan aktor utama yaitu PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, tetapi juga untuk mengkonstruksi pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antar organisasi serta implikasinya terhadap penguatan kapasitas ekonomi desa. Dengan mengacu pada kerangka teori dan kerangka konsep yang telah disusun sebelumnya, pembahasan ini dilakukan secara sistematis melalui integrasi antara analisis teoritik dan refleksi empiris.

Secara konseptual, kolaborasi antar organisasi dalam konteks administrasi publik modern tidak dapat dilepaskan dari paradigma *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan multi-aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kondisi awal, desain kelembagaan, serta kepemimpinan fasilitatif. Dalam konteks hubungan antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, ketiga elemen tersebut menjadi sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kolaborasi terbentuk dan dijalankan.

Misalnya, kondisi awal berupa kesenjangan kapasitas ekonomi masyarakat desa menjadi pendorong utama bagi terbentuknya kolaborasi, sementara desain kelembagaan yang jelas dan kepemimpinan yang inklusif menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi tersebut.

Lebih lanjut, Emerson dan Nabatchi (2015) melalui pendekatan *collaborative dynamics* menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan adanya interaksi antara *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Dalam konteks penelitian ini, *principled engagement* tercermin dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Proses ini melibatkan dialog, negosiasi, serta penyelarasan kepentingan yang memungkinkan terciptanya kesepakatan bersama. *Shared motivation* diwujudkan dalam bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas ekonomi. Sementara itu, *capacity for joint action* tercermin dalam kemampuan kolektif aktor-aktor tersebut dalam mengimplementasikan program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *inter-organizational collaboration*, hubungan antara ketiga aktor tersebut dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi yang dinamis dan kompleks. Gray (1989) menekankan bahwa kolaborasi terjadi ketika terdapat kesadaran akan interdependensi antar aktor, yang mendorong mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, PT PNM membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan desa untuk menjangkau masyarakat secara efektif, sementara pemerintah daerah dan desa memerlukan dukungan PT PNM dalam menyediakan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Agranoff dan McGuire (2003) menambahkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kapasitas manajerial dalam mengelola hubungan antar organisasi, termasuk dalam hal membangun jaringan, memfasilitasi komunikasi, dan mengelola konflik.

Namun demikian, dalam praktiknya, kolaborasi antar organisasi tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai faktor determinan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut. Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan faktor kunci dalam membangun kolaborasi yang efektif. Dalam konteks penelitian ini, tingkat kepercayaan antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sangat menentukan kualitas interaksi dan koordinasi yang terjalin. Selain itu, kesamaan visi dan tujuan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap aktor bergerak dalam arah yang sama. Emerson dan Nabatchi (2015) menambahkan bahwa motivasi bersama dan kapasitas kolektif juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi.

Dalam konteks kemitraan publik, hubungan antara PT PNM dan pemerintah dapat dianalisis melalui perspektif *public-private partnership* (PPP). Hodge dan Greve (2007) menyatakan bahwa PPP merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan pembagian risiko, tanggung jawab, dan manfaat antara sektor publik dan privat. Dalam

penelitian ini, PT PNM berperan sebagai penyedia layanan keuangan dan pendampingan usaha, sementara pemerintah daerah dan desa berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta dalam memfasilitasi implementasi program. Pembagian peran ini mencerminkan prinsip-prinsip PPP yang menekankan pada sinergi dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

Namun demikian, berbeda dengan PPP dalam sektor infrastruktur, kemitraan dalam konteks ini lebih bersifat sosial dan berbasis komunitas, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif. Dalam hal ini, konsep *co-production* dan *co-creation* menjadi relevan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat aktif dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *community-driven development* yang dikemukakan oleh Mansuri dan Rao (2013), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan.

Dalam dimensi penguatan kapasitas ekonomi desa, peran kolaborasi antar organisasi menjadi sangat krusial. Scoones (1998) melalui pendekatan *sustainable livelihood* menekankan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat ditentukan oleh akses terhadap berbagai jenis aset, termasuk aset finansial, manusia, sosial, dan kelembagaan. Dalam konteks ini, PT PNM berkontribusi dalam meningkatkan aset finansial melalui pembiayaan mikro, sementara pemerintah daerah dan desa berperan dalam meningkatkan aset kelembagaan dan sosial melalui kebijakan dan program pembangunan.

Blakely dan Leigh (2010) dalam teori *local economic development* menegaskan bahwa pembangunan ekonomi lokal yang efektif memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan serta pendekatan yang berbasis potensi lokal. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa memungkinkan adanya integrasi antara sumber daya eksternal dan potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program penguatan ekonomi desa.

Selain itu, teori *microfinance* yang dikemukakan oleh Ledgerwood (1999) menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal. Dalam konteks ini, PT PNM memainkan peran strategis dalam menyediakan pembiayaan mikro yang disertai dengan pendampingan usaha, yang tidak hanya meningkatkan akses terhadap modal, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program pembiayaan mikro sangat bergantung pada integrasi dengan program pembangunan lainnya, serta pada kualitas kolaborasi dengan aktor lain. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dan desa menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh PT PNM dapat terintegrasi dengan kebijakan dan kebutuhan lokal. Rondinelli (1981) dalam

teori desentralisasi menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pembangunan ekonomi lokal, sehingga kolaborasi dengan aktor lain menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pembangunan.

Sementara itu, pemerintah desa sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta dalam mengelola program pembangunan. Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan, namun juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan dan potensi dominasi oleh elite lokal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan aktor lain seperti PT PNM dan pemerintah daerah menjadi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar organisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas ekonomi desa, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integratif yang mampu mengakomodasi berbagai dimensi kolaborasi, termasuk aspek kelembagaan, relasional, dan kontekstual. Model ini harus mampu mengintegrasikan peran PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam suatu kerangka kerja yang sistematis dan adaptif.

Model integratif yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip *collaborative governance*, *inter-organizational collaboration*, dan *public-private partnership*, yang diintegrasikan dalam suatu kerangka kerja yang holistik. Model ini menekankan pentingnya kepercayaan, komunikasi, kepemimpinan, serta mekanisme koordinasi yang efektif dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Selain itu, model ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta pendekatan berbasis potensi lokal dalam penguatan kapasitas ekonomi desa.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar organisasi merupakan pendekatan yang sangat relevan dan strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Namun demikian, keberhasilan kolaborasi tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif dalam merancang dan mengimplementasikan model kolaborasi yang efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa, serta memberikan dasar bagi pengembangan model integratif yang menjadi kontribusi utama penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam

meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi desa berbasis kemitraan publik.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar organisasi dalam penguatan kapasitas ekonomi desa berbasis kemitraan publik merupakan suatu pendekatan strategis yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks administrasi publik modern. Kompleksitas permasalahan pembangunan ekonomi desa, yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang parsial. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integratif yang mampu mengakomodasi interaksi dan sinergi antara berbagai aktor, khususnya PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pertama, dari aspek karakteristik dan dinamika kolaborasi antar organisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa bersifat dinamis, interdependen, dan multidimensional. Kolaborasi ini tidak hanya terbentuk melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui interaksi informal yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi, dan komitmen bersama. Dalam praktiknya, kolaborasi ini mencerminkan prinsip-prinsip *collaborative governance* yang menekankan pada keterlibatan multi-aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Namun demikian, dinamika tersebut juga menunjukkan adanya tantangan, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan koordinasi, serta potensi tumpang tindih peran antar aktor.

Kedua, terkait dengan faktor determinan keberhasilan kolaborasi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepemimpinan yang fasilitatif, kapasitas kelembagaan, serta budaya organisasi yang mendukung kolaborasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup regulasi, dukungan kebijakan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di antara berbagai faktor tersebut, kepercayaan (*trust*), kesamaan visi (*shared vision*), serta komunikasi yang efektif menjadi elemen kunci yang menentukan kualitas dan keberlanjutan kolaborasi. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, kolaborasi berpotensi menjadi tidak efektif dan bahkan kontraproduktif.

Ketiga, dalam hal peran dan kontribusi masing-masing aktor, penelitian ini menunjukkan bahwa PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa memiliki peran yang saling melengkapi dalam kerangka kolaborasi. PT PNM berperan sebagai penyedia akses pembiayaan mikro dan pendampingan usaha, yang berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam merumuskan kebijakan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

pengembangan ekonomi lokal, sementara pemerintah desa berperan sebagai pelaksana program dan fasilitator partisipasi masyarakat. Sinergi antara ketiga aktor ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program penguatan kapasitas ekonomi desa.

Keempat, terkait dengan model integratif kolaborasi antar organisasi, penelitian ini menghasilkan suatu model konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *collaborative governance*, *inter-organizational collaboration*, dan *public-private partnership*. Model ini menekankan pentingnya integrasi antara dimensi kelembagaan, relasional, dan kontekstual dalam membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam model ini, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama teknis, tetapi sebagai proses strategis yang melibatkan penyelarasan visi, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang efektif.

Model integratif yang diusulkan juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal dalam penguatan kapasitas ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh aktor-aktor utama, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, model ini memiliki karakteristik yang adaptif dan kontekstual, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi daerah dengan penyesuaian yang sesuai.

Kelima, dari aspek implikasi teoritis dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kolaborasi antar organisasi dan kemitraan publik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya konsep *collaborative governance* dengan menghadirkan model integratif yang berbasis pada konteks pembangunan ekonomi desa. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan program kolaboratif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antar organisasi merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi desa di era modern. Namun demikian, keberhasilan kolaborasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalam membangun hubungan yang saling percaya, menyelaraskan visi dan tujuan, serta mengelola dinamika kolaborasi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kolaborasi yang benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

## B. Penutup

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas ekonomi desa merupakan agenda strategis dalam pembangunan nasional yang memerlukan pendekatan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kolaborasi antar organisasi antara PT PNM, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan kemitraan publik yang terintegrasi, berbagai sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing aktor dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama.

Namun demikian, penelitian ini juga menyadari bahwa implementasi kolaborasi antar organisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta membangun budaya kolaboratif di antara para aktor. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan mekanisme evaluasi dan pembelajaran yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam praktik kolaborasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan empiris yang masih terbatas pada konteks tertentu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji dan mengembangkan model yang diusulkan dalam berbagai konteks daerah yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian dengan melibatkan aktor-aktor lain, seperti sektor swasta yang lebih luas, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antar organisasi.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta dalam praktik pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Dengan mengintegrasikan perspektif teoritis dan praktis, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kolaborasi antar organisasi, tetapi juga menawarkan solusi yang inovatif dan aplikatif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan demikian, kolaborasi antar organisasi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.

- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-private partnerships: An international performance review. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington, DC: World Bank.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, DC: World Bank.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. *IDS Working Paper*, 72, 1–22.